

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung																			
Misi 2		Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan Kualitas SDM (Society Empowerment) keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.																	
Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD		
					(outcome)		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada		Penanggung Jawab
							target	Rp (Dalam Jutaan)	target	Rp (Dalam Jutaan)	target	Rp (Dalam Jutaan)	target	Rp (Dalam Jutaan)	target	Rp (Dalam Jutaan)	target	Rp (Dalam Jutaan)	
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
026	13	6	Tenaga kerja dan Transmigrasi																
			1. Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas TK															Disakertrans	
		.012	Jumlah Desa Produktif yang dibina		0	60 org	330	60 org	330	80 org	480	80 org	480	100 org	600	380 org	2.220	PENTAKER	
		4055	Jumlah instruktur LPKS pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki sertifikat			20 org	150	20 org	150	40 org	350	40 org	350	40 org	375	160 org	1.375	PENTAKER	
			Jumlah instruktur UPTD BLKI pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki sertifikat			10 org	500	10 org	500	10 org	600	10 org	600	10 org	650	50 org	2.850	PENTAKER	
			Jumlah manager BLK berbasis kompetensi yang terlatih			40 org	250	40 org	250	40 org	300	40 org	300	40 org	330	200 org	1.430	PENTAKER	
			Upgrading/Pelatihan Instruktur dan tenaga kepalithan pemerintahan dan swasta		0	30 org	211	30	250	30	275	50	350	50	370	190 org	1.456	PENTAKER	
			Upgrading Pengelola Pelatihan		0	40 org	250	40 org	250	40 org	300	40 org	300	40 org	350	200 org	1.450	PENTAKER	
			Jumlah peserta sosialisasi program sertifikasi tenaga kerja		0	60 org	280	60	280	60	310	60	310	60	345	300 org	1.525	PENTAKER	
			Jumlah tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing		0	160 org	1.000	160	1.000	240	1.750	240	1.750	240	2.000	1040 org	7.500	PENTAKER	
			Jumlah peserta pemagangan Perusahaan.		0	60	280	60	280	80	350	80	350	80	375	360 org	1.635	PENTAKER	
			Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat berbasis kompetensi		1000 org	160 org	1.000	200 org	1.250	200 org	1.250	210 org	1.350	230 org	1010 org	1000 org	6350	UPTD BLKI	
			Pelatihan Kewirausahaan Produktif Bagi Wirausaha Baru (pasca lulusan pelatihan BLKI)		800 Org	160 Org	800	160 Org	800	160 Org	800	160 Org	800	160 Org	800	800 Org	3.500	UPTD BPPD	
			Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja		700 Pelaku Usaha di 35 Desa	140 Org	420	140 Org	420	140 Org	420	140 Org	420	140 Org	420	700 Org	2.100	UPTD BPPD	
			Pembinaan Desa Produktif		35 desa 700 Org	7 Desa 140 Org	420	7 Desa 140 Org	420	7 Desa 140 Org	420	7 Desa 140 Org	420	7 Desa 140 Org	420	35 Desa	2.100	UPTD BPPD	
			Bimbingan Konsultasi Peningkatan Produktivitas Perusahaan		35 UMKM	7 UMKM	350	7 UMKM	350	7 UMKM	350	7 UMKM	350	7 UMKM	350	35 UMKM	1.750	UPTD BPPD	
			2. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja																
			Jumlah CTKS yang diberikan sosialisasi tentang penempatan tenaga kerja		200 org	100 org	60	200 org	120	300 org	180	400 org	240	500 org	300	1500 org	900	PENTAKER	
			Jumlah tenaga kerja mandiri sektor informal di pedesaan dan perkotaan		20 org	150 org	750	150 org	750	150 org	750	150 org	750	150 org	750	750 org	3.750	PENTAKER	
			Peningkatan kapasitas petugas lapangan padat karya		0	20 org	140	20 org	140	20 org	140	20 org	140	20 org	140	100 org	700	PENTAKER	
			Jumlah padat karya produktif dan instruktur di pedesaan dan perkotaan		0	150 org	1.000	150 org	1.000	150 org	1.000	150 org	1.000	150 org	1.000	750 org	5.000	PENTAKER	
			Peningkatan kapasitas petugas lapangan teknologi tepat guna		0	20 org	140	20 org	140	20 org	140	20 org	140	20 org	140	100 org	700	PENTAKER	
			Jumlah masyarakat pedesaan dan perkotaan yang melaksanakan terapan teknologi tepat guna		0	150 org	828	150 org	828	150 org	828	150 org	828	150 org	828	750 org	4.140	PENTAKER	
			Pemberdayaan pendampingan tenaga kerja mandiri dan kerja sama antar lembaga		0	20 org	120	20 org	120	20 org	120	20 org	120	20 org	120	100 org	600	PENTAKER	
			Pemberdayaan tenaga kerja sarjana di Kab./kota		0	20 org	400	20 org	425	20 org	450	20 org	475	20 org	500	100 org	2.250	PENTAKER	
			Kerjasama Hubungan yang sinergis antar Kab./Kota dan Provinsi		0	7 kab/kota	50	7 kab/kota	50	7 kab/kota	50	7 kab/kota	50	7 kab/kota	50	250 org	250	PENTAKER	
			Jumlah penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah (AKAD)/antar kerja lokal (AKL) dan kelembagaan tenaga kerja		0	50 org	100	50 org	100	75 org	150	75 org	150	100 org	200	350 org	700	PENTAKER	
			Jumlah tenaga penyuluh jabatan dan bimbingan jabatan		0	20 org	100	20 org	100	20 org	100	20 org	100	20 org	100	100 org	500	PENTAKER	
			Tersedianya data ketenagakerjaan dan peluang kerja di berbagai sektor melalui informasi pasar		0	7 kab/kota	125	7 kab/kota	125	7 kab/kota	150	7 kab/kota	150	7 kab/kota	165	475 org	715	PENTAKER	
			Tersedianya pegawai yang telah dibekali ilmu analisis pasar kerja		0	50 org	250	50 org	250	50 org	300	50 org	300	50 org	350	250 org	1.450	PENTAKER	
			Tersedianya pegawai / tenaga kerja yang telah dibekali ilmu analisa jabatan		0	50 org	250	50 org	250	50 org	300	50 org	300	50 org	350	250 org	1.450	PENTAKER	
			Meningkatnya pengendalian dan data TKA		0	30 prsh	75	40 prsh	100	50 prsh	125	60 prsh	150	70 prsh	175	250 org	625	PENTAKER	
			3. Program Pengembangan HI dan Jamsostek																
			Jumlah PP yg disahkan		135 PP	35 PP	70	70 PP	140	105 PP	210	140 PP	280	175 PP	350	660 PP	1320	WAS & HI	
			Jumlah Perjujian Kerja Bersama(PKB) yg terdaftar		29 PKB	35 PKB	70	70 PKB	140	105 PKB	210	140 PKB	280	175 PKB	350	554 PKB	1050	WAS & HI	
			Jumlah Koperasi Pekerja/buruh yg mendapatkan modal usaha		4 Kopkar	10 Kop	200	10 Kop	200	10 Kop	200	10 Kop	200	10 Kop	200	54 Kopkar	1.000	WAS & HI	
			Jumlah perusahaan yg menerapkan kesetaraan di tempat kerja		20 Prshn	35 Prshn	70	70 Prshn	140	105 Prshn	210	140 Prshn	280	175 Prshn	350	765 Prshn	1050	WAS & HI	
			Jumlah pembentukan lembaga kerjasama (LKS) Bipartit di Perusahaan		25 Prshn	70 Prshn	140	80 Prshn	160	90 Prshn	180	100 Prshn	200	110 Prshn	220	475 Prshn	900	WAS & HI	
			Jumlah pembinaan lembaga kerjasama (LKS) Tripartit di kab/kota		7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	75	7 Kab/Kota	75	7 Kab/Kota	75	7 Kab/Kota	75	7 Kab/Kota	75	7 Kab/Kota	375	WAS & HI	
			Peningkatan kapasitas anggota LKS Bipartit dan Tripartit		150 Orang	40 Tk	80	40 Tk	80	40 Tk	80	40 Tk	80	40 Tk	80	350 Tk	400	WAS & HI	
			Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan tentang hubungan industrial		150 Orang	40 TK	80	40 Tk	80	40 Tk	80	40 Tk	80	40 Tk	80	350 Orang Tk	400	WAS & HI	
			Rasio penyelesaian perselisihan HI di luar pengadilan HI terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama		60%	75%	75	75%	75	75%	75	75%	75	75%	75	75%	375	WAS & HI	
			Jumlah TK yang bekerja dalam hubungan kerja (DHK) yang menjadi peserta jamsostek		48.456 Tk	250 Tk	250	350 Tk	350	350 Tk	350	450 Tk	450	500Tk	500	50.356 Tk	1.900	WAS & HI	
			Jumlah TK Luar Hubungan Kerja (LHK) yang menjadi peserta jamsostek		-	200 Tk	200	200 Tk	200	200 Tk	200	200 Tk	200	200 Tk	200	1000 Tk	1.000	WAS & HI	
			Perusahaan yang menerapkan pengupahan berdasarkan perundingan dan/atau penerapan struktur dan skala upah		690	35 Prshn	70	35 Prshn	70	35 Prshn	70	35 Prshn	70	35 Prshn	70	865 Prshn	350	WAS & HI	
			4. Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan																
			Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA		-	100 anak	100	100 anak	100	100 anak	100	100 anak	100	100 anak	100	500 anak	500	WAS & HI	
			Tersedianya kebijakan dalam upaya perlindungan pekerja perempuan dan anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	WAS & HI	
			Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak		10%	10%	25	10%	27.5	10%	30.25	10%	33.30	10%	36.60	60%	152.65	WAS & HI	
			Kerjasama penerapan norma kerja perempuan dan anak		10%	10%	25	naik 10%	27.5	naik 10%	30.25	naik 10%	33.30	naik 10%	36.60	60%	152.65	WAS & HI	
			Advokasi penerapan norma kerja perempuan dan anak		40%	10%	25	naik 15%	28.75	naik 15%	33	naik 15%	38	naik 15%	43.7	90%	168.45	WAS & HI	
			Perusahaan yang melaksanakan aturan waktu kerja, waktu istirahat dan pengupahan		15%	10%	25	naik 10%	27.5	naik 10%	30.25	naik 10%	33.30	naik 10%	36.60	65%	152.65	WAS & HI	
			Perusahaan yang melaksanakan aturan penempatan dan pelatihan tenaga kerja		10%	10%	25	naik 10%	27.5	naik 10%	30.25	naik 10%	33.30	naik 10%	36.60	60%	152.65	WAS & HI	
			Perusahaan yang melaksanakan aturan hubungan kerja dan kebebasan berserikat		20%	10%	25	naik 10%	27.5	naik 10%	30.25	naik 10%	33.30	naik 10%	36.60	70%	152.65	WAS & HI	
			Pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja (JK dan JKK)		50%	10%	25	naik 10%	27.5	naik 10%	30.25	naik 10%	33.30	naik 10%	36.60	100%	152.65		
